JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 2022 hal 379- 384

Pengenaan Pajak Penghasilan Pengusaha E-Commerce Shopee Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018

Isna Ardila¹, Zuraida Ulfa²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : isnaardila@umsu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the compliance of e-commerce entrepreneurs regarding the imposition of income tax on online businesses based on Government Regulation no. 23 of 2018. This study uses a descriptive research approach, and from 110 populations or respondents used 15 Shopee e-commerce entrepreneurs spread across the city. Medan as the research sample obtained from purposive sampling technique. Data collection techniques were carried out using questionnaires and interviews. The results showed that the tax compliance of Shope e-commerce entrepreneurs in Medan City on Government Regulation no. 23 of 2018 is still classified as very low due to the lack of understanding of e-commerce entrepreneurs regarding Government Regulation no. 23 of 2018 causing non-compliance in carrying out the obligation to pay taxes.

Keywords: *Government Regulation no. 23 of 2018, income tax, e-commerce, compliance*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini berdampak pada dunia perdagangan. Transaksi jual beli konvensional perlahan-lahan sudah mulai ditinggalkan dan beralih ke transaksi secara digital (Afrizal Tahar dan Delvina Dwi Septian, 2021). Sistem perdagangan yang sebelumnya *costumer* harus datang langsung untuk membeli barang-barang kebutuhannya, sekarang dimana saja *costumer* berada bisa melakukan transaksi secara *online*. *E-commerce* mengurangi aktivitas perjalanan ke toko fisik untuk berbelanja (Dolfen et al., 2019). Tidak hanya dari sisi *costumer* saja yang dimudahkan, dari pihak pedagang pun juga dimudahkan dengan adanya *marketplace* atau *e-commerce* karena pedagang tidak harus memiliki atau menyewa tempat untuk memajang barang dagangannya, cukup hanya dengan mengunggah katalog barang serta menuliskan keterangan pada gambar bagaimana cara memesan, cara membayar, harga, rincian barang, warna yang tersedia, ukuran, maka transaksi *e-commerce* sudah dapat dilakukan (Yapar et al., 2015).

Perkembangan dan kemajuan teknologi merubah dunia perdagangan secara *online* atau *e-commerce* (Makalalag, 2016). Begitu cepatnya perkembangan *e-commerce* telah menjadikan peluang baru yang memicu pertumbuhan perdagangan di dunia (Su et al., 2019). Indonesia merupakan negara 10 terbesar pertumbuhan *e-commerce* dengan pertumbuhan 78% dan berada di peringkat pertama di dunia. Jumlah transaksi yang terjadi di *marketplace* sangat besar. Besarnya transaksi pada online *marketplace* dapat dilihat dari beberapa online *marketplace* yang banyak digunakan di Indonesia seperti, Tokopedia, Bukalapak, dan juga Shopee.

Kota Medan sebagai kota ke 3 terbesar di Indonesia juga tidak terlepas dari

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 2022 hal 379- 384

perdagangan online atau *e-commerce*. Peningkatan penjualan melalui *e-commerce* Shopee selama 2 tahun belakangan ini meningkat sekitar 50% dibanding dengan tahun 2019 dan diikuti juga dengan bertambahnya jumlah toko *online* yang ada di Kota Medan (Evifania, 2020)

Banyaknya bermunculan pelaku usaha *e-commerce* menimbulkan pertanyaan apakah mereka sebagai pelaku usaha *e-commerce* mengetahui bahwa aktivitas transaksi perdagangan online memuat unsur kewajiban perpajakan. Pelaku usaha *e-commerce* maupun pelaku usaha konvensional mendapatkan perlakuan pajak yang sama yaitu dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan usaha yang diperoleh dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk yang dijual.

Sehingga pada hakikatnya keduanya adalah sama Menurut Fox (2001), *e-commerce* juga mengakibatkan kerugian di negara bagian dan lokal karena transaksi *ecommerce* tidak sebanding dengan penerimaan pajak yang didapatkan. Sehingga niat pemerintah menarik pajak dari semua transaksi *e-commerce* semakin kuat (Adam & Astin, 2019). Implikasi pajak transaksi *e-commerce* agak rumit dan memiliki karakteristik yang sangat khusus karena berbeda dengan transaksi perdagangan biasa pada umumnya (Sari, 2018).

Menurut Surat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 32/PJ/2010, pelaku usaha melalui *e-commerce* dikategorikan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Selain itu, untuk transaksi *e-commerce* yang telah di edarkan oleh Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *e-commerce* (Puspawati, 2016). Cara kerja jual beli *online* yang tidak begitu banyak mengeluarkan biaya operasional, sehingga mendapatkan penghasilan yang lebih dari jual beli konvensional, maka sudah sepantasnya pengusaha *online* dikenakan pajak atas penghasilan transaksi jual beli di *marketplace*. Terkait dengan pajak penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenakan tarif pajak

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 mengenai pengenaan pajak untuk UMKM dikenai tarif sebesar 0.5%. Peraturan ini khusus dikenakan bagi pengusaha *e-commerce* yang memiliki omset per tahunnya dibawah Rp 4,8 Miliar Untuk pengusaha *e-commerce* yang memiliki omset diatas Rp 4,8 Miliar maka harus mengikuti peraturan perundang-undangan dibidang pajak (Susilo, 2013).

Namun demikian ,masih ada saja pengusaha *e-commerce* Shopee yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengusaha *e-commerce* Shopee yang tidak paham dan bahkan tidak mencari tahu mengenai kewajiban pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah. Di Kota Medan sendiri, terdapat sebanyak 110 usaha *online shop* yang terdaftar di *platform* Shopee. Dari jumlah didapatkan bahwa sekitar 14% usaha yang terdaftar di Shopee tidak mengetahui tarif pajak dan tidak memahami tentang kewajiban membayar pajak dan bahkan ada yang tidak membayar pajak. Berdasarkan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kepatuhan pengusaha *e-commerce* tentang pengenaan pajak penghasilan atas usaha *online* berdasarkan Peraturan Pemerintah no 23 tahun 2018

TINJAUAN PUSTAKA

Nilai Perusahaan

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 2022 hal 379- 384

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Terdapat 2 jenis penerimaan dari sektor pajak yaitu pajak langsung yang dikenakan dari penghasilan atau Pajak Penghasilan dan pajak tidak langsung yaitu Pajak Pertambahan (Zulia Hanum Nilai, 2018). Pengenaan pajak untuk pengusaha *e-commerce* sama seperti pengenaan pajak terhadap perdagangan konvensional. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai pajak penghasilan, yaitu pengenaan pajak untuk UMKM dikenai tarif sebesar 0.5%. Peraturan ini khusus dikenakan bagi bisnis *online shop* yang memiliki omset dibawah 4,8 Milyar. Sedangkan untuk pengusaha *e-commerce* yang memiliki omset diatas 4,8 Milyar maka akan dikenakan PPh badan dengan tarif 25% sesuai dengan pasal 17 ayat (1b) Undang- undang Nomor 36 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 menjelaskan tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pasal 2 ayat 1 menyatakan penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan atas usaha yang diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan bersifat final dalam jangka waktu tertentu (Nurlinda and Sinuraya, 2020).

Pajak Penghasilan

Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh pengusaha *e-commerce* dibedakan dalam 2 jenis, yaitu berdasarkan subjek pajak orang pribadi dan subjek pajak badan. Subjek pajak orang pribadi pada bisnis *e-commerce* merupakan para pelaku bisnis *online* yang bersifat individual dalam menjalankan usahanya. Sebagai contoh pengusaha *e-commerce* tersebut hanya memiliki toko pada *online marketplace* atau situs web pribadi sebagai tempat usaha. Bentuk transaksi yang digunakan juga melalui media elektronik seperti *smartphone*, komputer, *online shop*, ATM, dan sejenisnya. Sedangkan untuk subjek pajak badan merupakan para pelaku bisnis *online shop* yang memiliki tempat usaha tidak hanya didunia maya namun juga didunia nyata seperti CV, PT, dan lainnya.

Kewajiban pajak lain yang dikenakan bagi pengusaha *e-commerce* adalah PPh 21 atas gaji karyawan, PPh 23 dikenakan untuk wajib pajak dalam negeri yang menerima penghasilan modal, dan PPh 26 atas dividen atau bunga serta Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dengan tarif 1%. Dalam mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

E-Commerce

E-commerce merupakan sebuah aktivitas pembelian, penjualan, mentransfer atau bertukar produk, jasa atau informasi dengan menggunakan komputer melalui Internet (Samsiana *et al.*, 2020). *E-commerce* didefinisikan sebagai transaksi ekonomi saat pembeli dan penjual bersama-sama melalui media elektronik dari internet membentuk kontrak perjanjian mengenai harga dan pengiriman barang atau jasa tertentu dan menyelesaikan transaksi melalui pengiriman dan pembayaran barang atau jasa sesuai kontrak (Indah, Yanti and Hajratul, 2020).

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 Tentang Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi E-commerce pada tahun 2015. SE-06/PJ/2015 mengklasifikasi *e-commerce* menjadi 4 bagian, yaitu *Online Marketplace*, *Classified Ads*, *Daily Deals*, dan *Online Retail*.

METODOLOGI PENELITIAN

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 2022 hal 379- 384

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha e-commerce Shoope di Kota Medan berjumlah lebih kurang sekitar 110. Dari 110 pengusaha e-commerce shoope yang digunakan menjadi sampel hanya sebanyak 15, jumlah sampel diambil dengan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner yang dilakukan terkait kepatuhan terkait Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 maka hasil penelitian ini menemukan bahwa para pengusaha tersebut tidak mengetahui adanya Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 yang dibuat pemerintah sebagai peraturan mengenai penetapan tarif pajak bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga tidak mematuhi akan adanya peraturan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepatuhan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 bagi para pengusaha *e-commerce* tergolong masih sangat rendah karena pengusaha tersebut banyak yang belum mengetahui jika usahanya dikenakan pajak. Kemudian ada juga dari pengusaha *e-commerce* yang berpendapat bahwa memahami terkait Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, akan tetapi pengusaha tersebut beranggapan jika usahanya akan membayar pajak apabila pendapatannya sudah besar.

Dengan diberlakukannya peraturan ini memberikan dampak yang positif dan negatif bagi tingkat kepatuhan pengusaha *e-commerce* Shopee sebagai wajib pajak yang ada di Kota Medan, diantaranya yaitu efek atau pengaruh positif dan negatif.

Efek positif yang ditimbulkan karena diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang, karena dengan diterbitkannya peraturan ini wajib pajak tidak perlu bersusah payah menghitung pajak yang terhutang, karena langsung dikenakan tarif 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan. Kemudian dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena tarif yang ditetapkan lebih rendah dari peraturan yang dibuat pemerintah pada tahun 2013 yang menetapkan tarif 1% dari peredaran bruto setiap bulannya.

Efek negatif yang terkait bagi wajib pajak pengusaha *e-commerce* yang memiliki penghasilan yang tidak menetap setiap bulannya atau kurang dari target penjualan, mereka akan merasa dirugikan dengan diterbitkannya PP No.23 tahun 2018 tentang tarif UMKM tersebut, apalagi peraturan tersebut juga berlaku bagi wajib pajak yang sedang mengalami kerugian dalam usahanya. Sehingga hal ini mengakibatkan wajib pajak untuk enggan membayar pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce* yang terdaftar di Shopee di Kota Medan. Kemudian, sosialisasi yang tidak ada di lakukan Pemerintah di Kota Medan juga menjadikan alasan pengusaha *e-commerce* tidak patuh membayar pajak karena tidak adanya perhatian Pemerintah terhadap pengusaha *e-commerce* tentang pemahaman Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2018 guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh pengusaha *e-commerce* Shopee diketahui bahwa para pengusaha *e-commerce* yang terdaftar di Shopee tersebut banyak yang memahami kewajiban perpajakan yang harus dijalankannya, akan tetapi masih memenuhi kewajiban perpajakannya terutama pada kebijakan yang dibuat melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Hal ini terjadi karena adanya kendala yang dihadapi oleh para pengusaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil wawancara, adapun kendala yang dihadapi pengusaha *e-commerce* yang menyebabkan ketidakpatuhan dalam pembayaran paja adalah sebagai

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 2022 hal 379- 384

berikut:

- a. Tingkat rata-rata penerimaan pajak rendah sehingga target tidak tercapai.
- b. Data dasar pengenaan pajak selalu tidak akurat, misalnya ada wajib atau objek pajak yang belum terdata.
- c. Dorongan atas pengaruh negatif dari masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tidak jelasnya *reward* yang akan didapatkan oleh masyarakat. Kondisi itu, membuat masyarakat cenderung mendorong orang lain untuk tidak membayar pajak.
- d. Kebijakan pemerintah daerah yang sangat timpang, seperti masih adanya pemerintah daerah yang belum menerapkan aturan pajak daerah dengan maksimal
- e. Kurangnya pengetahuan mengenai perhitungan pajak untuk pedagang *online*.

Masih rendahnya kepatuhan pengusaha *e-commerce* shoope dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan ketidakpahaman pengusaha *e-commerce* Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan, dan pemerintah masih kurang melakukan sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Hal tersebut menjadikan para pengusaha *e-commerce* shoope yang ada di Kota Medan tidak mengetahui bahwa usaha yang dijalankannya dikenakan pajak. Pengusaha *e-commerce* yang menjadikan Shopee sebagai wadah untuk menjalankan bisnisnya masih banyak yang tidak memahami tata cara penentuan pengenaan tarif pajak yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, dimana hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah, sehingga apabila para pelaku usaha memahami mengenai tarif pajak yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018, maka memungkinkan para pelaku usaha *online shoope* akan patuh terhadap pembayaran pajak (Sularsih, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, D. V., & Astin, I. P. (2019). Kebijakan Pengenaan Pajak atas Transaksi Online (E-Commerce). Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi (FIRMA).
- Afrizal Tahar, Delvina Dwi Septian. 2021. Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Pengusaha dalam Transaksi Perdagangan Online (*E-commerce*) Studi Pengusaha Online di Yogyakarta. Jurnal Akuntansi. Vol. 31 No. 6
- Dolfen, P., Einav, L., Klenow, P. J., Klopach, B., Levin, J. D., Levin, L., & Best, W. (2019). Assessing The Gains from E-Commerce. Retrieved from <http://www.nber.org/papers/w25610>
- Evifania, Cristine. (2020) *Aktivitas Belanja Digital di Sumut Meningkat, Sumatra.Bisnis.com*.
- Fox, W. F. (2001). State and Local Sales Tax Revenue Losses from E-Commerce : Updated Estimates. 4170(September).
- Makalalag, L. (2016). Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan Online (*E-Commerce*). Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 4(1), 1–10.
- Nurlinda and Sinuraya, J. (2020) „Potensi Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)“, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 20(2), pp. 126–141.
- Puspawati, D. (2016) „Studi Kualitatif Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Untuk Melakukan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) (Studi Kasus Pada Pelaku Social Commerce)“, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 1(2), pp. 119–125.
- Samsiana, S. et al. (2020) „Pemanfaatan Media Sosial dan Ecommerce Sebagai Media Pemasaran Dalam Mendukung Peluang Usaha Mandiri Pada Masa Pandemi Covid 19“, *Jurnal Sains Teknologi dalam Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), pp. 51–62.
- Sari, R. P. (2018). Kebijakan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce. Journal Feb Unmul AKUNTABEL, 1.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 2022 hal 379- 384

- Su, W., Wang, Y., Qian, L., Zeng, S., Baležentis, T., & Streimikiene, D. (2019). Creating a Sustainable Policy Framework for Cross-Border E-Commerce in China. *Sustainability (Switzerland)*, 11(4).
- Sularsih, H. (2018) „Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Pajak UMKM di Kota Malang“, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 3(3), pp. 1–8.
- Susilo, E. J. (2013) „Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)“, (46), pp. 1–10.
- Yapar, B. K., Bayrakdar, S., & Yapar, M. (2015). The Role of Taxation Problems on the Development of E-Commerce. *Social and Behavioral Sciences*, 195, 642– 648.
- Zulia Hanum. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol 18, No.2, pp. 123-133